



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KOTA KENDARI

2024

PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **FITRIANI SINAPOY, A.PI.,MP**
JABATAN : **Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KENDARI**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **MUHAMMAD YUSUP, SE., M.Si**
JABATAN : **Pj. WALI KOTA KENDARI**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak P e r t a m a berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 15 JANUARI 2024

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD YUSUP, SE., M.Si

PIHAK PERTAMA

FITRIANI SINAPOY, A.PI.,MP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KENDARI

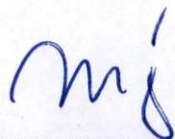
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83 %
		Capaian Status Kota Layak Anak	Nindya

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4,315,817,284	
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 320.468.420	
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 184.015.240	
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 84.816.100	
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 18.082.200	
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 166.443.600	
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 378.899.710	

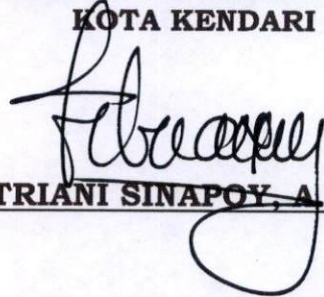
Kendari, 15 JANUARI 2024

Pj.WALI KOTA KENDARI

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KENDARI



MUHAMMAD YUSUP, SE., M.Si



FITRIANI SINAPOY, A.PI.,MP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jumiati, SH., MM

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fitriani Sinapoy, A.Pl., MP

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Kendari

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

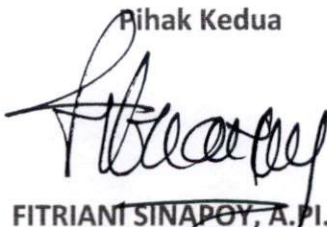
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kendari,

Januari 2024

Pihak Kedua


FITRIANI SINAPOY, A.Pl., MP
NIP. 19760910 200002 2 003

Pihak Pertama


JUMIATI, SH., MM
NIP. 19730606 199502 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KENDARI


NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.315.817.284	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 888.000	
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 888.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.795.114.017	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.767.258.417	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 12.069.600	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 15.786.000	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 25.260.680	
1.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 1.588.680	
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 23.672.000	
1.4	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 167.488.306	
1.4.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 4.261.200	
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 23.364.522	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 28.381.520	
1.4.4	Penyediaan Bahan/Material	Rp 5.374.464	
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 18.025.000	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 62.012.000	
1.4.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 26.069.600	

1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	77.145.228	
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	59.940.000	
1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	17.205.228	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	47.175.600	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	16.200.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	9.933.600	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	21.042.000	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	202.745.453	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	64.169.564	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	102.607.485	
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesing Lainnya	Rp	9.360.000	
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	23.908.404	
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	2.700.000	

Kendari, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Kendari,


FITRIANI SINAPOY, A.PI., MP
NIP. 19760910 200002 2 003

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Kendari,


JUMIATI, SH., MM
NIP. 19730606 199502 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novianty Amin, S.TP
Jabatan : Kasubag Perencanaan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jumiati, SH., MM
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kota Kendari

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

Pihak Kedua,

Jumiati, SH., MM

NIP. 19730606 199502 2 001

Pihak Pertama,

Novianty Amin, S.TP

NIP. 19741121 201407 2 001

**PERJANJIAN KINERJA KASUBAG PERENCANAAN
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
2.	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 Org/bulan
3.	Terlaksananya kegiatan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen
4.	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 laporan
5.	Terlaksananya Kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 dokumen
6.	Terlaksananya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	2 orang
7.	Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket
8.	Terlaksananya Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket
9.	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket
10.	Terlaksananya Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 paket
11.	Terlaksananya Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan
12.	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan
13.	Terselenggaranya Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen
14.	Terlaksananya Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit laptop

15.	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3 unit (Alat bermain anak, mesin pompa air, tandon air)
16.	Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan
17.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 laporan
18.	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan
19.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit
20.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit
21.	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit laptop/PC, 8 CCTV
22.	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit
23.	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.315.817.284	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 888.000	
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 888.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.795.114.017	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.767.258.417	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 12.069.600	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 15.786.000	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 25.260.680	
1.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 1.588.680	
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 23.672.000	
1.4	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 167.488.306	
1.4.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 4.261.200	
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 23.364.522	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 28.381.520	
1.4.4	Penyediaan Bahan/Material	Rp 5.374.464	
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 18.025.000	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 62.012.000	
1.4.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 26.069.600	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 77.145.228	
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 59.940.000	
1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 17.205.228	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 47.175.600	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 16.200.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 9.933.600	

1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	21.042.000	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	202.745.453	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	64.169.564	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	102.607.485	
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesing Lainnya	Rp	9.360.000	
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	23.908.404	
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	2.700.000	

Kendari, Januari 2024

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Kendari,



Jumiati, SH., MM

NIP. 19730606 199502 2 001

Kasubag Perencanaan,



Novianty Amin, S.TP

NIP. 19741121 201407 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wa Ode Hamida, SE.,M.Si

Jabatan : Kasubag Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jumiati, SH., MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kota Kendari

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

Pihak Kedua,

Jumiati, SH., MM

NIP. 19730606 199502 2 001

Pihak Pertama,

Wa Ode Hamida, SE.,M.Si

NIP. 19680505 199203 2 012

PERJANJIAN KINERJA KASUBAG KEUANGAN
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
2.	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 Org/bulan
3.	Terlaksananya kegiatan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen
4.	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 laporan
5.	Terlaksananya Kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 dokumen
6.	Terlaksananya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	2 orang
7.	Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket
8.	Terlaksananya Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket
9.	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket
10.	Terlaksananya Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 paket
11.	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan
12.	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan
13.	Terselenggaranya Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen
14.	Terlaksananya Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit laptop

15.	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3 unit (Alat bermain anak, mesin pompa air, tandon air)
16.	Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan
17.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 laporan
18.	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan
19.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit
20.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit
21.	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit laptop/PC, 8 CCTV
22.	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit
23.	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.315.817.284	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 888.000	
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 888.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.795.114.017	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.767.258.417	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 12.069.600	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 15.786.000	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 25.260.680	
1.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 1.588.680	
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 23.672.000	
1.4	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 167.488.306	
1.4.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 4.261.200	
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 23.364.522	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 28.381.520	
1.4.4	Penyediaan Bahan/Material	Rp 5.374.464	
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 18.025.000	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 62.012.000	
1.4.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 26.069.600	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 77.145.228	
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 59.940.000	
1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 17.205.228	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 47.175.600	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 16.200.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 9.933.600	

1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	21.042.000	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	202.745.453	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	64.169.564	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	102.607.485	
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesing Lainnya	Rp	9.360.000	
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	23.908.404	
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	2.700.000	

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Kendari,


Jumiati, SH., MM

NIP. 19730606 199502 2 001

Kendari, Januari 2024

Kasubag Keuangan,


Wa Ode Hamida, SE., M.Si

NIP. 19680505 199203 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiky Reskianti I.P.,S.T.,M.AP.
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jumiati, SH., MM
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kota Kendari

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

Pihak Kedua,

Jumiati, SH., MM

NIP. 19730606 199502 2 001

Pihak Pertama,

Kiky Reskianti I.P.,S.T.,M.AP.

NIP. 19900707 201503 2 001

**PERJANJIAN KINERJA KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
2.	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 Org/bulan
3.	Terlaksananya kegiatan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen
4.	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 laporan
5.	Terlaksananya Kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 dokumen
6.	Terlaksananya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	2 orang
7.	Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket
8.	Terlaksananya Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket
9.	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket
10.	Terlaksananya Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 paket
11.	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan
12.	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan
13.	Terselenggaranya Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen
14.	Terlaksananya Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit laptop

15.	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3 unit (Alat bermain anak, mesin pompa air, tandon air)
16.	Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan
17.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 laporan
18.	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan
19.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit
20.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit
21.	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit laptop/PC, 8 CCTV
22.	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit
23.	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.315.817.284	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 888.000	
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 888.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.795.114.017	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.767.258.417	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 12.069.600	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 15.786.000	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 25.260.680	
1.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 1.588.680	
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 23.672.000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 167.488.306	
1.4.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 4.261.200	
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 23.364.522	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 28.381.520	
1.4.4	Penyediaan Bahan/Material	Rp 5.374.464	
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 18.025.000	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 62.012.000	
1.4.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 26.069.600	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 77.145.228	
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 59.940.000	
1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 17.205.228	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 47.175.600	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 16.200.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 9.933.600	

1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	21.042.000	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	202.745.453	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	64.169.564	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	102.607.485	
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesing Lainnya	Rp	9.360.000	
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	23.908.404	
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	2.700.000	

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Kendari,



Jumiati, SH., MM

NIP. 19730606 199502 2 001

Kendari, Januari 2024

Kasubag Umum dan Kepegawaian,



Kiky Reskianti I.P., S.T., M.AP.

NIP. 19900707 201503 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Asma Ali, SE

Jabatan : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Fitriani Sinapoy, A.Pi., MP

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Kendari

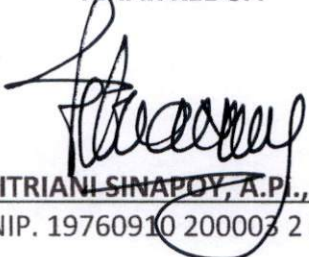
Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA


FITRIANI SINAPOY, A.Pi., MP
NIP. 19760910 200003 2 003

PIHAK PERTAMA


Hj. ASMA ALI, SE
NIP. 19880218 201101 2 015

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KENDARI

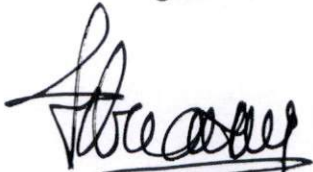
No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase kelembagaan PUG aktif	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	80%
		Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	100%

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 320.468.420	
1.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 21.427.340	
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 9.563.640	
1.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp 11.863.700	
1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 299.041.080	
1.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Rp 299.041.080	
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 84.816.100	
2.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 18.301.500	
2.1.1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 18.301.500	

2.2	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	66.514.600	
2.2.1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	66.514.600	

Kendari, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari



FITRIANI SINAPOY, A.Pi., MP
NIP. 19760910 200003 2 003

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan,



Hj. ASMA ALI, SE
NIP. 19880218 201101 2 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. Asmawati, BA**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. Asma Ali, SE**
Jabatan : **Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

Pihak Kedua,

Hj. Asma Ali, SE
NIP. 19880218 201101 2 015

Pihak Pertama,

Hj. Asmawati, BA
NIP. 19660818 198810 2 001

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 dokumen
2.	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk perencanaan pembangunanan responsif gender (PPRG)	45 perangkat daerah
3.	Terlaksananya Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	4 dokumen
4.	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	1 dokumen
5.	Terlaksananya penyediaan layanan komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak	100%

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 320.468.420	
1.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 21.427.340	
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 9.563.640	
1.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp 11.863.700	
1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 299.041.080	
1.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Rp 299.041.080	
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 84.816.100	
2.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 18.301.500	
2.1.1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 18.301.500	
2.2	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 66.514.600	
2.2.1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 66.514.600	

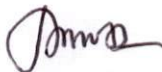
Kendari, Januari 2024

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan,



Hj. Asma Ali, SE
NIP. 19880218 201101 2 015

Analisis Kebijakan Ahli Muda,



Hj. Asmawati, BA
NIP. 19660818 198810 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mustarim, S.Si**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. Asma Ali, SE**
Jabatan : **Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

Pihak Kedua,

Hj. Asma Ali, SE
NIP. 19880218 201101 2 015

Pihak Pertama,

Mustarim, S.Si
NIP. 19800110 200903 1 001

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 dokumen
2.	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk perencanaan pembangunanan responsif gender (PPRG)	45 perangkat daerah
3.	Terlaksananya Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	4 dokumen
4.	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	1 dokumen
5.	Terlaksananya penyediaan layanan komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak	100%

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 320.468.420	
1.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 21.427.340	
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 9.563.640	
1.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp 11.863.700	
1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 299.041.080	
1.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Rp 299.041.080	
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 84.816.100	
2.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 18.301.500	
2.1.1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 18.301.500	
2.2	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 66.514.600	
2.2.1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 66.514.600	

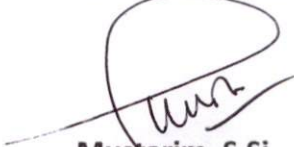
Kendari, Januari 2024

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan,



Hj. Asma Ali, SE
NIP. 19880218 201101 2 015

Analisis Kebijakan Ahli Muda,



Mustarim, S.Si
NIP. 19800110 200903 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurlinah, SH**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. Asma Ali, SE**
Jabatan : **Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

Pihak Kedua,

Hj. Asma Ali, SE
NIP. 19880218 201101 2 015

Pihak Pertama,

Nurlinah, SH
NIP. 19730703 200701 2 020

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 dokumen
2.	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk perencanaan pembangunanan responsif gender (PPRG)	45 perangkat daerah
3.	Terlaksananya Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	4 dokumen
4.	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	1 dokumen
5.	Terlaksananya penyediaan layanan komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak	100%

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 320.468.420	
1.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 21.427.340	
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 9.563.640	
1.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp 11.863.700	
1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 299.041.080	
1.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Rp 299.041.080	
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 84.816.100	
2.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 18.301.500	
2.1.1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 18.301.500	
2.2	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 66.514.600	
2.2.1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 66.514.600	

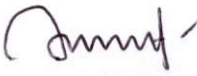
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan,



Hj. Asma Ali, SE
NIP. 19880218 201101 2 015

Kendari, Januari 2024

Analisis Kebijakan Ahli Muda,



Nurlinah, SH
NIP. 19730703 200701 2 020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ekawati Kolibu, S.SiT., M.Kes

Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Fitriani Sinapoy, A.Pi., MP

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Kendari

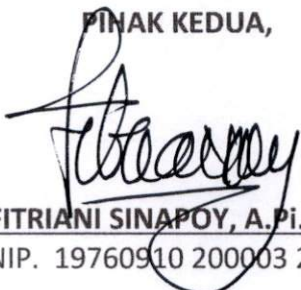
Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA,


FITRIANI SINAPOY, A.Pi., MP
NIP. 19760910 200003 2 003

PIHAK PERTAMA,


EKAWATI KOLIBU, S.SiT., M.Kes
NIP. 19721028 199203 2 010

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KENDARI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Capaian Status Kota Layak Anak	Nindya

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp 166.443.600	
1.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 66.045.200	
1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 23.164.000	
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 42.881.200	
1.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 100.398.400	
1.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40.450.800	
1.2.2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 59.947.600	

Kendari, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari


FITRIANI SINAPOY, A.Pi., MP
NIP. 19760910 200003 2 003

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak ,


EKAWATI KOLIBU, S.SiT., M.Kes
NIP. 19721028 199203 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Andi Tendri Ajeng Hamzah, SE**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ekawati Kolibu, S.Si.T,M.Kes**

Jabatan : **Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

Pihak Kedua,

Ekawati Kolibu, S.Si.T,M.Kes

Nip. 19721028 199203 2 010

Pihak Pertama,

Andi Tendri Ajeng Hamzah, SE

NIP. 19790903 200212 1 004

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	77 organisasi
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen
4.	Terlaksananya Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	1 dokumen

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp 166.443.600	
1.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 66.045.200	
1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 23.164.000	
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 42.881.200	
1.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 100.398.400	
1.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40.450.800	
1.2.2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 59.947.600	

Kendari, Januari 2024

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak,



Ekawati Kolibu, S.Si.T,M.Kes
Nip. 19721028 199203 2 010

Analisis Kebijakan Ahli Muda,



Andi Tendri Ajeng Hamzah, SE
NIP. 19790903 200212 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Reskiyanti, S.Pt**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Ekawati Kolibu, S.Si.T,M.Kes**
Jabatan : **Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

Pihak Kedua,

Ekawati Kolibu, S.Si.T,M.Kes

Nip. 19721028 199203 2 010

Pihak Pertama,

Reskiyanti, S.Pt

NIP. 19801021 200801 2 013

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	77 organisasi
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen
4.	Terlaksananya Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	1 dokumen

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp 166.443.600	
1.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 66.045.200	
1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 23.164.000	
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 42.881.200	
1.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 100.398.400	
1.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40.450.800	
1.2.2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 59.947.600	

Kendari, Januari 2024

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak,



Ekawati Kolibu, S.Si.T,M.Kes
Nip. 19721028 199203 2 010

Analisis Kebijakan Ahli Muda,



Reskiyanti, S.Pt
NIP. 19801021 200801 2 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Noviana Wulandari, S.Sos**

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ekawati Kolibu, S.Si.T,M.Kes**

Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

Pihak Kedua,

Ekawati Kolibu, S.Si.T,M.Kes

Nip. 19721028 199203 2 010

Pihak Pertama,

Noviana Wulandari, S.Sos

NIP. 19751121 201001 2 003

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	77 organisasi
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen
4.	Terlaksananya Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	1 dokumen

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp 166.443.600	
1.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 66.045.200	
1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 23.164.000	
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 42.881.200	
1.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 100.398.400	
1.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40.450.800	
1.2.2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 59.947.600	

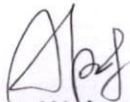
Kendari, Januari 2024

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak,



Ekawati Kolibu, S.Si.T,M.Kes
Nip. 19721028 199203 2 010

Analisis Kebijakan Ahli Muda,



Noviana Wulandari, S.Sos
NIP. 19751121 201001 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fenty Effendy, SE

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fitriani Sinapoy, A.Pi., MP

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Kendari

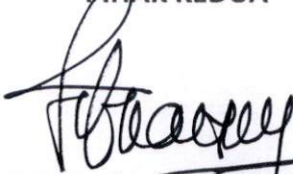
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA


FITRIANI SINAPOY, A.Pi., MP
NIP. 19760910 200003 2 003

PIHAK PERTAMA


FENTY EFFENDY, SE
NIP. 19691216 200502 2 001

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KENDARI**

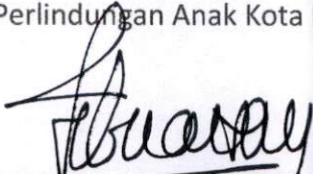
No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	50%
		Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Gender dan Anak	55%

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 191.072.910	
1.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 95.905.390	
1.1.1	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	Rp 95.905.390	
1.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.251.200	
1.2.1	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp 7.251.200	
1.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 87.916.320	
1.3.1	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 18.896.400	
1.3.2	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 69.019.920	


2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	18.082.200	
2.1	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	18.082.200	
2.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	18.082.200	

Kendari, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari


FITRIANI SINAPOY, A.P.I., MP
NIP. 19760910 200003 2 003

Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak,


FENTY EFFENDY, SE
NIP. 19691216 200502 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. M. Romy Yulianto, STP.,MM

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fenty Effendy, SE

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

Pihak Kedua,

Fenty Effendy, SE

NIP. 19691216 200502 2 001

Pihak Pertama,

R. M. Romy Yulianto, STP.,MM

NIP. 19750702 200801 1 008

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	57 Orang
2.	Terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kab/kota	Jumlah kegiatan Kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan
3.	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kab/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	45 Orang
4.	Tersedianya Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak	2 dokumen

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 191.072.910	
1.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 95.905.390	
1.1.1	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	Rp 95.905.390	
1.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.251.200	
1.2.1	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp 7.251.200	
1.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 87.916.320	
1.3.1	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 18.896.400	
1.3.2	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 69.019.920	

2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	18.082.200	
2.1	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	18.082.200	
2.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	18.082.200	

Kendari, Januari 2024

Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak,



Fenty Effendy, SE
NIP. 19691216 200502 2 001

Analisis Kebijakan Ahli Muda,



R. M. Romy Yulianto, STP.,MM
NIP. 19750702 200801 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wa Ode Mpuka, S.Si
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fenty Effendy, SE
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

Pihak Kedua,

Fenty Effendy, SE

NIP. 19691216 200502 2 001

Pihak Pertama,

Wa Ode Mpuka, S.Si

NIP. 19800914 200701 2 007

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	57 Orang
2.	Terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kab/kota	Jumlah kegiatan Kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan
3.	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kab/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	45 Orang
4.	Tersedianya Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak	2 dokumen

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 191.072.910	
1.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 95.905.390	
1.1.1	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	Rp 95.905.390	
1.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.251.200	
1.2.1	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp 7.251.200	
1.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 87.916.320	
1.3.1	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 18.896.400	
1.3.2	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 69.019.920	

2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	18.082.200	
2.1	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	18.082.200	
2.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	18.082.200	


Kendari, Januari 2024

Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak,



Fenty Effendy, SE
NIP. 19691216 200502 2 001

Analisis Kebijakan Ahli Muda,



Wa Ode Mpuka, S.Si
NIP. 19800914 200701 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Sitti Bae, S.Sos., M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Fitriani Sinapoy, A.PI., MP**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Kendari

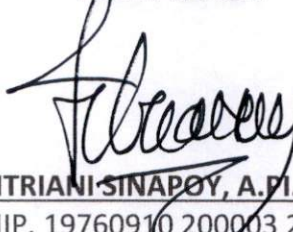
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA


FITRIANI SINAPOY, A.PI., MP
NIP. 19760910 200003 2 003

PIHAK PERTAMA


SITTI BAE, S.Sos., M.Si
NIP. 19770124 199902 2 001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KENDARI

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Rasio KDRT	1:13.841


No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Perlindungan Perempuan	Rp 104.717.840	
1.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 104.717.840	
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 83.699.890	
1.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 21.017.950	

Kendari, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari,


FITRIANI SINAPOY, A.Pi., MP
NIP. 19760910 200003 2 003

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan,


SITTI BAE, S.Sos., M.Si
NIP. 19770124 199902 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rosnawati, S.Si**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Siti Bae, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Kepala Bidang Perlindungan Perempuan**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

Pihak Kedua,

Siti Bae, S.Sos., M.Si

NIP. 19770124 199902 2 001

Pihak Pertama,

Rosnawati, S.Si

NIP. 19690110 199209 2 001

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, prpgram dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 dokumen
2.	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan Pendampingan layanan perlindungan perempuan	70 perangkat daerah


NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Program Perlindungan Perempuan	Rp 104.717.840	
1.1	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Rp 104.717.840	
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Rp 83.699.890	
1.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Rp 21.017.950	

Kendari, Januari 2024

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan,

Analisis Kebijakan Ahli Muda,


Siti Bae, S.Sos., M.Si
NIP. 19770124 199902 2 001


Rosnawati, S.Si
NIP. 19690110 199209 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yusmiati, S.Sos**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Siti Bae, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

Pihak Kedua,

Siti Bae, S.Sos., M.Si

NIP. 19770124 199902 2 001

Pihak Pertama,

Yusmiati, S.Sos

NIP. 19831211 200212 2 001

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, prpgram dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 dokumen
2.	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan Pendampingan layanan perlindungan perempuan	70 perangkat daerah

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Program Perlindungan Perempuan	Rp 104.717.840	
1.1	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Rp 104.717.840	
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Rp 83.699.890	
1.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Rp 21.017.950	

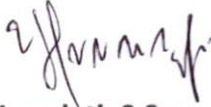
Kendari, Januari 2024

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan,

Analisis Kebijakan Ahli Muda,


Siti Bae, S.Sos., M.Si

NIP. 19770124 199902 2 001


Yusmiati, S.Sos
NIP. 19831211 200212 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rusfianah, S.Sos**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Siti Bae, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Kepala Bidang Perlindungan Perempuan**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Siti Bae, S.Sos., M.Si

NIP. 19770124 199902 2 001

Rusfianah, S.Sos

NIP. 19691013 199803 2 006

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, prpgram dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 dokumen
2.	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan Pendampingan layanan perlindungan perempuan	70 perangkat daerah

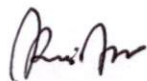
NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Program Perlindungan Perempuan	Rp 104.717.840	
1.1	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Rp 104.717.840	
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Rp 83.699.890	
1.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Rp 21.017.950	

Kendari, Januari 2024

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan,

Analisis Kebijakan Ahli Muda,


Siti Bae, S.Sos., M.Si
NIP. 19770124 199902 2 001


Rusfianah, S.Sos
NIP. 19691013 199803 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hizal Joisman, SP

Jabatan : Kepala UPTD PPA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Fitriani Sinapoy, A.Pi., MP

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Kendari

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

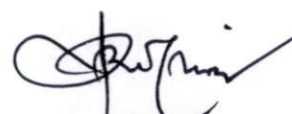
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA


FITRIANI SINAPOY, A.Pi., MP
NIP. 19760910 200003 2 00

PIHAK PERTAMA


HIZAL JOISMAN, SP
NIP. 19730412 200801 1 016

PERJANJIAN KINERJA KEPALA UPTD PPA
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KENDARI


No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten / kota	20 Orang
2.	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	10 Layanan
3.	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	20 Orang
4.	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	28 Layanan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Perlindungan Perempuan	Rp 79.297.400	
1.1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 79.297.400	
1.1.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 12.982.400	
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 66.315.000	

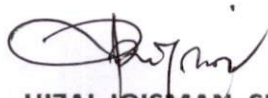
2	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	187.826.800	
2.1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	187.826.800	
2.1.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	18.671.800	
2.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp	169.155.000	

Kendari, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari


FITRIANI SINAPOY, A.Pi., MP
NIP. 19760910 200003 2 00

Kepala UPTD PPA,


HIZAL JOISMAN, SP
NIP. 19730412 200801 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan, SE
Jabatan : Kepala Tata Usaha UPTD PPA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hizal Joisman, SP
Jabatan : Kepala UPTD PPA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Hizal Joisman, SP

Nip. 19730412 200801 1 016

Irwan, SE

NIP. 19690619 201408 1 001

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA TATA USAHA UPTD PPA
TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten / kota	20 Orang
2.	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	10 Layanan
3.	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	20 Orang
4.	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	28 Layanan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Perlindungan Perempuan	Rp 79.297.400	
1.1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 79.297.400	
1.1.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 12.982.400	

1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	66.315.000	
2	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	187.826.800	
2.1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	187.826.800	
2.1.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	18.671.800	
2.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp	169.155.000	

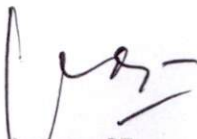
Kendari, Januari 2024

Kepala UPTD PPA

Kepala Tata Usaha UPTD PPA


Hizal Joisman, SP

Nip. 19730412 200801 1 016


Irwan, SE

NIP. 19690619 201408 1 001